

Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)

Amjad Trifita¹, Ridha Amaliyah²

UIN Sunan Ampel Surabaya

email: amzadtryvita@gmail.com¹, ridha.amaliyah@uinsby.ac.id²

ABSTRACT

The research aims to analyze the strategy of the government of Surabaya as one of Indonesia's metropolitan cities in manifesting sustainable city as mandated by United Nations on Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Vision. The SDGs commitment of sustainable city and society becomes a strong encouragement for local governments around the world to play its role in realizing the agenda. The research is conducted using descriptive quantitative method and supported by various literatures as well as interviews of stakeholders. By focusing the strategy implemented in 2016-2019, the local government of Surabaya and United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) initiates Global Public Space Programme. This research found that the public space project is carried out through 3 (three) strategies: (1) partnerships in the field of urban planning; (2) the use of Minecraft games in public space design; and implementation of the Global Public Space Program pilot project in three locations, which are Ketandan, Keputih and Tanah Kali Kedinding.

Key Words: *public space, sustainable city, Surabaya, Sustainable Development Goals*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia mewujudkan kota berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Vision. Komitmen SDGs menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah di seluruh dunia untuk memainkan perannya dalam mewujudkan agenda dimaksud. Tulisan ini berfokus pada metode kualitatif deskriptif yang disertai dukungan data literatur dan wawancara para pemangku kepentingan. Dengan menekankan pada pelaksanaan strategi di tahun 2016-2019, pemerintah kota Surabaya bekerjasama dengan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) menginisiasi pelaksanaan Global Public Space Programme. Strategi yang telah ditempuh pemerintah kota Surabaya adalah dengan (1) pembentukan kemitraan di bidang tata kelola kota, (2) penggunaan permainan Minecraft untuk desain tata kota, dan (3) menjalankan proyek nyata ruang publik di tiga titik strategis, yakni kampung Ketandan, Keputih, dan Tanah Kali Kedinding.

Kata-Kata Kunci: *ruang publik, kota berkelanjutan, Surabaya, Sustainable Development Goals*

Pendahuluan

Diperkirakan sejak tahun 2009, lebih dari setengah jumlah populasi kota di dunia dan jumlah penghuni perkotaan akan bertambah dua kali lipat dalam beberapa dekade mendatang (UCLG ASPAC 2016). Kota-kota di Asia Pasifik secara konsisten telah menjadi lokasi dengan tingkat urbanisasi paling cepat di dunia karena menciptakan banyak peluang hidup bagi banyak orang. Pada tahun 2010, populasi perkotaan di wilayah Asia-Pasifik berjumlah 754 juta orang. Jumlah tersebut lebih dari jumlah populasi gabungan Amerika Serikat dan Uni Eropa (UNESCAP 2019). Pada 2018, setengah dari populasi di wilayah Asia Pasifik tinggal di kawasan perkotaan (habitat3.org 2019).

Di balik kemajuan ekonomi dan sosial masyarakatnya, wilayah perkotaan dianggap rentan, khususnya di tengah cepatnya laju perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Jika dilema ini tidak segera diatasi, masa depan kota dapat terancam. Menanggapi isu ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki-Moon menyatakan bahwa cepatnya perluasan wilayah perkotaan, khususnya di negara berkembang, memerlukan perencanaan yang matang agar tetap terwujud tujuan kota berkelanjutan (un.org 2013).

Kejenuhan dan tekanan aktivitas kota membuat masyarakat membutuhkan sarana pelepasan untuk kembali berbaur dengan lingkungan alam serta berinteraksi dengan sesama. Taman kota, hutan kota, alun-alun, ruang terbuka, dan *pedestrian* memfasilitasi warga untuk memperoleh kebutuhan tersebut (bappenas.go.id 2019). Di wilayah perkotaan, warga datang ke taman atau ruang terbuka untuk menikmati keindahan alam dan mengurangi stress. Alasan lainnya adalah ruang terbuka hijau menyerap panas dan karbondioksida, mengurangi polusi udara, membantu mengendalikan datangnya badai, dan memelihara biodiversitas (Cohen 2015, 32). Pembangunan ruang publik memiliki fungsi strategis guna mengembalikan sekaligus menjaga keseimbangan kehidupan perkotaan dalam aspek hubungan sosial maupun ekologis masyarakat kota. Keberadaan ruang publik bukan semata bagian penunjang tata ruang kota, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi kualitas habitat perkotaan.

Mewujudkan kota berkelanjutan merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda bersama yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi masyarakat global, baik di masa sekarang dan di masa depan. Mewujudkan SDGs secara bersamaan dapat mengatasi tantangan global yang tengah dihadapi, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan ketidakadilan (un.org 2016). Mewujudkan kota berkelanjutan telah menjadi salah satu tujuan SDGs yang ke-11, yaitu mewujudkan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*). Tujuan ini menempatkan kota-kota sebagai inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi (uclg.org 2019). Kemajuan kota, kemudian, menjadi daya tarik bagi arus urbanisasi yang akan semakin memperbesar tuntutan pembangunan ruang kota.

PBB melalui UN-Habitat meluncurkan Global Public Space Programme pada tahun 2012 dalam upaya menciptakan ruang publik dengan standar yang telah ditentukan sehingga mencapai kota yang berkelanjutan.¹ Hasil penelitian UN-Habitat menunjukkan bahwa proporsi kota yang baik memiliki sekitar 50% dari luas permukaan yang didedikasikan untuk tempat umum, dengan rincian 30% untuk jalan dan trotoar dan 20% untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. Sayangnya, sedikit kota di dunia dapat memenuhi target ini (unhabitat.org 2019).

Indonesia sebagai negara berkembang pun tidak luput dari permasalahan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2010 lebih dari separuh penduduk Indonesia atau sebanyak 54,2% tinggal di perkotaan. Sementara pada 2025, jumlah penduduk diprediksi naik signifikan dimana 68 % dari populasi di Indonesia akan tinggal di kota (Jegho 2016). Proporsi penduduk perkotaan Indonesia telah melampaui rata-rata proporsi penduduk perkotaan di kawasan Asia. Proporsi penduduk perkotaan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang umumnya berkisar antara 35–40% (BPS 2017). Selain itu, tren pertumbuhan kota-kota kecil juga

¹ UN-Habitat adalah badan PBB yang bekerja di bidang ruang publik selama lebih dari 20 tahun. Hingga pada waktu 2011, Dewan Pemerintahan UN-Habitat serta negara-negara anggota PBB, secara khusus meminta UN-Habitat menempatkan fokus pada ruang publik sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan perotaan berkelanjutan. www.unhabitat.org

menunjukkan bahwa kota-kota kecil di Indonesia juga tumbuh dengan begitu cepat (Tim UGM 2015). Hal ini merupakan peringatan bagi kota-kota di Indonesia untuk mengantisipasi tantangan dan permasalahan akibat bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan, seperti menurunnya luas lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik.

Salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia adalah Surabaya. Menurut Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi Kota Surabaya, tingkat urbanisasi Surabaya di 2000 mencapai 40% dan diperkirakan akan menjadi 60% pada 2025 atau sekitar 160 juta jiwa Surabaya. Jika prediksi benar, Surabaya akan berkembang menjadi kawasan *mega-urban*, yakni sebuah kawasan perkotaan yang amat luas dengan jumlah penduduk besar (disnaker.surabaya.go.id 2016).

Surabaya mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh fenomena urbanisasi yang kemudian berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Kota Surabaya. Surabaya merupakan kota yang sebagian besar wilayahnya dipadati oleh bangunan, seperti kantor, hotel, mall, dan pabrik. Akibatnya, lahan-lahan yang seharusnya disediakan untuk ruang publik bagi masyarakat kota menjadi terabaikan (Shandy 2016). Tidak adanya keseimbangan pembangunan di wilayah kota Surabaya membuat kota ini terkesan panas karena area hijau sangat minim dan ruang publik sangat terbatas. Sementara itu, keberadaan ruang hijau kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota. Alhasil, ruang publik yang merupakan bagian penting bagi sebuah kota akhirnya terbengkalai sehingga mengurangi konektivitas masyarakat Surabaya. Untuk itu, keberadaan ruang publik mutlak dibutuhkan karena ruang publik dapat menjadi indikator terciptanya kota layak huni (Ravazzoli dan Torricelli 2017).

Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kota berkelanjutan, pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan kerjasama dengan United Cities Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC).² Dalam hal ini, pemkot Surabaya bekerjasama dengan UCLG ASPAC dalam pengembangan tata kelola kota, melalui pembangunan ruang publik (*public space*) di Surabaya. Kerjasama ini mengacu pada program Global Public Space Programme (GPSP) yang merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh UN-Habitat dalam konteks penyediaan ruang publik bagi suatu kota. Karena perhatian pada ruang publik yang semakin meningkat, terutama sejak tahun 2011, Dewan Pemerintahan UN-Habitat serta negara-negara anggota PBB mengamanatkan UN-Habitat untuk menggabungkan ruang publik pada program kerjanya, serta mengembangkan dan mempromosikan tata ruang publik, dan secara langsung membantu kota-kota dalam memprakarsai ruang publik (unhabitat.org 2017).

Konsep

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada konsep pembangunan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Sustainable Development Goals (SDGs) serta konsep diplomasinya (*sustainable development diplomacy – SDD*) untuk melihat lebih jauh proses keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan Surabaya menjadi kota berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah dibahas oleh para ilmuwan dalam Roman Club di akhir 1960-an (Klarin 2018, 71). Mereka mengkritisi kondisi pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang. Isu yang dipandang kritis pada masa itu adalah terbatasnya sumberdaya alam, meningkatnya jumlah populasi, industrialisasi yang berlebihan, serta masalah lingkungan. Pada 1978, PBB melaksanakan Conference on the

² UCLG ASPAC ialah perkumpulan pemerintah daerah se-Asia pasifik yang memiliki tujuan untuk membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya.

Human Environment di Stockholm, Swedia, dengan hasil formulasi definisi awal pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan tanpa penghancuran, pembangunan yang beriringan dengan alam/lingkungan (Klarin 2018, 73). Sembilan tahun sesudahnya, konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan luas ke publik dalam laporan Brundtland berjudul *Our Common Future* yang dipublikasikan oleh World Commission on Environment and Development. Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (WCED 1987, 5).

Definisi mendasar tersebut kemudian berkembang luas meskipun pondasinya tetap memuat elemen kunci pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan sosial-ekonomi, pemerataan kebutuhan manusia, serta penggunaan yang bijak demi generasi mendatang (Klarin 2018, 76). Esensi dari pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah *triple bottom line*, di mana menyeimbangkan tiga pilar: (1) lingkungan berkelanjutan, (2) sosial berkelanjutan, dan (3) ekonomi berkelanjutan. Lingkungan berkelanjutan berarti melestarikan kualitas lingkungan demi berlangsungnya aktivitas kehidupan manusia. Sosial berkelanjutan menjaga hak asasi manusia (HAM) dan persamaan, memelihara identitas kultural, menghargai perbedaan kultural, ras dan agama. Ekonomi berkelanjutan berarti menjaga modal alam, sosial, dan manusia yang diperlukan sebagai standar hidup.

Attfield (2015, 107) menyatakan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan haruslah dipahami lebih dari sekedar perhitungan untung rugi biaya yang harus ditanggung oleh manusia bila alam rusak. Pembangunan berkelanjutan seharusnya dilihat sebagai eksistensi nilai (*value*) karena kehadiran alam sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Konsep berkelanjutan mengandung makna bahwa semua yang ada saat ini akan diwariskan ke generasi berikutnya. Alam adalah modal (*natural capital*). Jeffrey Sachs, pun mengklaim bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep utama sekaligus tantangan krusial di kehidupan generasi saat ini, konsep di mana tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang (Sachs 2015, 4-11). Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai interaksi tiga sistem, yakni ekonomi global, masyarakat global, dan lingkungan. Untuk mewujudkannya, pendekatan komprehensif pun harus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya demi hadirnya masyarakat yang sejahtera (Sachs 2015, 4).

Pengambilan keputusan setiap aksi oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, haruslah mempertimbangkan hubungan, keterkaitan, kelengkapan, dan ketegangan diantara ketiga pilar (Mensah dan Casadevall 2019, 1). Karenanya, pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dan dipromosikan demi kepentingan umat manusia. Untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terlaksana dengan efektif, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan lokal, organisasi internasional seperti PBB, pihak swasta, masyarakat sipil haruslah sadar dan terlibat, baik dalam manajemen sumber (*resource management*), kebijakan, regulasi, maupun pendidikan (Mensah dan Casadevall 2019, 2).

Setelah konferensi Stockholm, perwujudan nyata mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh PBB melalui konferensi-konferensi lainnya, diantaranya Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992 yang merilis *Agenda 21 Action Plan* sebagai panduan awal pembangunan berkelanjutan; Climate Change Conference di Kyoto, Jepang, tahun 1997 yang menghasilkan Protokol Kyoto berisi pengurangan emisi gas kaca dan CO₂; deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) oleh PBB tahun 2000; World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002; serta Third World Climate Conference, di Jenewa, Swiss, tahun 2009.

Pada konferensi PBB di Rio de Janeiro Juni 2012, telah dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep SDGs lahir dengan tujuan untuk membuat rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi (UNDP 2015). Sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politik selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030 (un.org 2016). Setiap negara berkewajiban untuk mengimplementasikan SDGs. Prinsip utama SDGs adalah berlaku secara universal, dengan sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mewujudkan kota berkelanjutan di tengah pesatnya wilayah tujuan urbanisasi seperti kota Surabaya. Menurut ICLEI Local Governments for Sustainability, makna kota berkelanjutan adalah kota yang sehat dan tangguh secara lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi warganya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tujuan kota berkelanjutan adalah membangun tempat tinggal yang berdampak minim terhadap lingkungan (Cohen 2015, 3). Menurut laporan PBB tahun 2013, kota berkelanjutan dapat terwujud bila empat pilarnya ditegakkan, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, manajemen lingkungan, dan tatakelola kota (United Nations 2013).

Kota berkelanjutan adalah tempat yang menarik perhatian masyarakat, budaya, maupun perdagangan, kota yang menyediakan kesempatan bagi manusia untuk berinteraksi dan tempat manusia membangun potensinya. Bentuk dari budaya, perdagangan, hiburan, dan interaksi sosial dapat bervariasi tergantung budaya, selera, dan tradisi di masing-masing kota dan masyarakat (Cohen 2015, 4). Maka, fungsi pemerintah lokal adalah menyediakan kesempatan dan fasilitas tersebut agar aktifitas dimaksud bisa terlaksana. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, partisipasi aktif pemerintah lokal sebagai otoritas dan pembuat kebijakan sangatlah krusial. Isu global yang dialami oleh masyarakat di berbagai negara perlu aksi bersama (*collective actions*) pula agar tertangani dengan efektif.

Studi lanjut tentang pembangunan dan kota berkelanjutan bervariasi keluarannya termasuk Blowers et al. (2012) yang mengkritisi rencana strategis pembangunan berkelanjutan, Murphy (2012) dan Boström (2012) yang menekankan fokusnya pada salah satu pilar pembangunan berkelanjutan saja. Gray (2010), Mensah dan Enu-Kwesi (2018) menyatakan perlunya definisi lebih konkrit terhadap konsep pembangunan berkelanjutan serta dimensi penyertanya. Yazdani dan Dola (2013) membahas kota berkelanjutan sebagai bentuk nyata pembangunan berkelanjutan sembari menaruh perhatian khusus kepada isu prioritas kota berkelanjutan di Barat dan Timur. Jurnal terbaru dari Khan et al. (2020) mempertegas bahwa pembangunan kota berkelanjutan haruslah melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah lokal, akademisi, media, swasta, serta pemangku kepentingan lainnya.

Upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan tersebut dilakukan dalam kerangka diplomasi dan negosiasi. Secara tradisional, diplomasi menjadi metode komunikasi positif yang ditempuh oleh utusan pemerintah satu negara dengan negara lainnya. Dalam perkembangan hubungan antarnegara, peran diplomasi meluas ketika ia melibatkan pihak non-pemerintah, seperti pihak profesional/ahli, perusahaan/swasta, tokoh masyarakat, media, dan aktivis (Diamond dan McDonald 1996). Dalam isu pembangunan berkelanjutan, diplomasi perlu struktur pemerintahan dan pendekatan yang segar untuk menghasilkan kondisi yang signifikan (Chasek dan Wagner 2012).

Untuk menjembatani dua isu yang diteliti, studi ini meminjam konsep diplomasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development diplomacy - SDD*) oleh Moomaw et al. (2017). Konsep tersebut mengungkapkan bahwa isu pembangunan berkelanjutan yang

telah bergulir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak kendala, di mana salah satunya adalah tidak adanya kesepakatan bagaimana isu ini seharusnya ditangani.

Diplomasi pembangunan berkelanjutan menyajikan sebuah rujukan yang mempertimbangkan elemen negosiasi, pemerintahan, dan ekosistem sosial-politik dalam proses pembangunan berkelanjutan (Moomaw et al. 2017, 2). Diplomasi pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 7 tahapan, yakni memetakan ulang isu pembangunan berkelanjutan di luar perspektif lingkungan, sosial, dan ekonomi, menggunakan negosiasi atas dasar kepentingan bersama demi menarik sebanyak mungkin pemangku kepentingan, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, menggunakan segala sumber informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah, membuat portofolio aksi yang berisi target-target penanganan sesuai kompleksitas masalah, mengidentifikasi tingkat organisasi politik dan sosial yang perannya paling efektif dan akuntabel, dan memastikan bahwa segala sumber daya yang dipakai bersifat fleksibel dan cepat merespon.

Upaya perwujudan Surabaya sebagai kota berkelanjutan belum pernah dibahas oleh penstudi sebelumnya, sehingga tulisan ini diharapkan bisa mengisi kekosongan dalam bidang terkait di masa mendatang.

Metode

Tulisan ini adalah penelitian yang menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penjelasan melalui studi kasus dipakai dan dikolaborasikan dengan sumber primer melalui wawancara pemangku kepentingan dan sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan, serta artikel daring, agar topik dapat digali secara maksimal. Unit analisis yang diteliti berada di tingkat sub-pemerintah, yakni pemkot Surabaya sebagai pelaksana utama program Global Public Space Programme. Pemangku kepentingan lainnya adalah pelaksana pendukung seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Timur, Komunitas Urban Sketch Surabaya, komunitas difabel Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Keputih, serta mahasiswa Jurusan Arsitektur UNTAG dan ITS.

Hasil dan Diskusi

Menurut UN-Habitat, ruang publik meliputi ruang yang bisa diakses dan dinikmati oleh semua orang, tanpa tujuan untuk mengambil keuntungan (UN Habitat 2017). Setiap ruang publik memiliki fitur spasial, sejarah, lingkungan, sosial dan ekonominya sendiri. Ruang publik merupakan elemen kunci dari setiap individu dan kesejahteraan sosial, tempat kehidupan kolektif masyarakat, serta ekspresi keragaman kekayaan alam dan budaya (Andersson 2016).

Ruang publik dapat dikelompokkan menjadi enam kategori utama (UN Habitat 2017). Poin pertama ialah jalan sebagai ruang publik (*streets as public spaces*). Jalan merupakan ruang publik dalam artian sebenarnya, karena dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang sepanjang waktu tanpa biaya. Jalan dapat menjadi pasar terbuka, pertunjukan seni, demonstrasi politik, dan kegiatan sektor informal. Jenis jalan yang dimaksud dapat berupa jalan raya, trotoar, jalan pintas/gang, jalur sepeda. Selanjutnya ialah ruang terbuka publik. Bentuk ruang terbuka ini termasuk taman (*parks*), kebun, taman bermain, pantai, tepian sungai, dan tepi laut. Poin ketiga yakni fasilitas umum perkotaan. Ruang publik dalam kategori ini seperti perpustakaan, pusat kegiatan warga/komunitas, pasar, dan fasilitas olahraga.

Poin berikutnya adalah ruang untuk publik (*spaces for public*). Dalam pengertian ini, hak milik bersama bukan hanya barang dan tempat, tetapi juga kesepakatan sosial di mana

warga memiliki hak untuk berkontribusi dalam mencapai kebaikan bersama, serta mempercayakan manajemen kota kepada pemerintah lokal yang dipilih secara sah. Bila kesepakatan sosial ini dilanggar, kehadiran ruang untuk publik ini pun akan terancam seiring dengan terancamnya demokrasi itu sendiri. Poin kelima adalah kota. Wilayah fisik perkotaan dapat diposisikan sebagai arena dan ekspresi ruang publik milik seluruh warga.

Poin keenam adalah dunia maya (*cyber space*). Dunia maya kini menjadi ruang publik baru. Ketika satu sama lain tidak bisa menghadirkan dirinya secara fisik, dan mereka hanya berkumpul dan membentuk suatu komunitas secara virtual, hal tersebut dapat diakui sebagai ruang publik. Saat ini, interaksi virtual dapat mewujudkan tujuan ekonomi, meningkatkan kesadaran terhadap keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Global Public Space Programme (GPSP) diluncurkan oleh UN-Habitat pada 2012. Program ini melibatkan pemerintah lokal, organisasi nirlaba, dan mitra lainnya untuk mengimplementasikan proyek ruang publik di seluruh dunia. Saat ini, program GPSP aktif di lebih dari 30 kota di seluruh dunia, di antaranya Bangladesh, Bolivia, Brazil, Ethiopia, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Mexico, Mongolia, Mozambique, Palestine, Peru, Senegal, South Africa, Syria and Vietnam. Tujuan dari Global Public Space Programme ialah (UN Habitat 2017):

1. Mempromosikan ruang publik sebagai elemen penting untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota, dan sebagai tuas utama dalam implementasi agenda baru perkotaan, dan untuk memantau implementasi SDG 11.7.
2. Memperkuat pengetahuan, pendekatan, alat dan metodologi pada ruang publik dan membuatnya dapat diakses, terutama untuk mitra pemerintah daerah.
3. Melibatkan jaringan mitra yang lebih luas dalam kebijakan dan praktek ruang publik.
4. Menunjukkan melalui proyek percontohan pentingnya ruang publik sehingga mencapai manfaat dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan manfaat lainnya.

GPSP didanai oleh Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) yang menyediakan dana untuk kebijakan dan pengembangan alat untuk proyek ruang publik, Block By Block Foundation, dan Microsoft.

Munculnya GPSP menjadi salah satu komitmen global dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. GPSP hadir sebagai solusi dari permasalahan yang ditimbulkan dari urbanisasi. Sementara, banyak kota yang cenderung fokus pada pembangunan yang bersifat material dan eksploitasi lahan tanpa menyisahkan kebutuhan ruang bagi masyarakat kota dalam melakukan interaksi antar sesama manusia dan lingkungan dalam sebuah ruang publik (UN-Habitat 2017). GPSP hadir sebagai pedoman bagi kota-kota di dunia terkait bagaimana penyediaan ruang publik yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota.

Pemerintah kota Surabaya berkolaborasi dengan UCLG ASPAC dalam mengimplementasikan Global Public Space Programme melalui tiga strategi berikut (uclg-aspac.org 2017) :

1. Kemitraan Perencanaan Kota

Pemerintah Surabaya dan UCLG ASPAC menggandeng mitra dalam pelaksanaan proyek ruang publik. Mitra yang ikut berkontribusi dalam proyek GPSP adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Timur, Ikatan Arsitek Lanskap Jawa Timur dan Surabaya, Himpunan Desainer Interior Indonesia Jawa Timur, Komunitas Urban Sketch Surabaya, Komunitas Mural, Komunitas Difabel Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Keputih, dan Mahasiswa Jurusan Arsitektur UNTAG dan ITS. Mitra dari berbagai bidang

ilmu ini sengaja dihadirkan untuk memberikan wawasannya tentang konsep ruang publik yang dibutuhkan masyarakat Surabaya.

2. Penggunaan Aplikasi Gim Minecraft

Minecraft adalah permainan yang diciptakan oleh Mojang. Minecraft merupakan salah satu gim yang paling populer di dunia, dengan lebih dari 100 juta pengguna (habitat3.org 2016). Pada 2012, Mojang dan UN Habitat berkolaborasi menggunakan Minecraft sebagai alat simulasi (*simulation tools*) mendesain ruang publik perkotaan. Kehadiran gim Minecraft mengubah cara berpikir warga yang tadinya menganggap bahwa desain ruang publik adalah ranah keilmuan khusus seperti arsitektur atau tata kota.

Pemkot Surabaya dan UN Habitat menyediakan pelatihan model Minecraft dalam desain ruang publik. Warga pun didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Dalam pelatihan, peserta dilatih untuk bekerja bersama, membangun, dan meningkatkan model. Peserta dapat membangun dan menjelajahi lingkungan buatan mereka dengan menempatkan balok gim tersebut dengan mudah. Penggunaan Minecraft merupakan model yang sengaja digunakan agar warga dapat berpartisipasi dalam merancang ruang publik sesuai kebutuhan mereka (UN Habitat 2017).

Penggunaan aplikasi gim Minecraft tersebut memudahkan warga Surabaya, khususnya golongan pemuda, untuk menyumbangkan idenya terkait model ruang publik yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan begitu, keterbukaan dan kebebasan untuk menyalurkan ide-ide brilian mengenai pembangunan kota tidak hanya datang dari otoritas pemerintah. Pelatihan partisipatif memposisikan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda merasa diberi kesempatan untuk berkontribusi dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Kontribusi dari pihak masyarakat tidak memandang dari segala usia, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, agama, dan kemampuan fisik untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab berdasarkan tujuan pada pembangunan kota berkelanjutan. Di Surabaya, pihak pemkot Surabaya dengan UCLG ASPAC melibatkan komunitas difabel dalam proses desain ruang publik di Surabaya. Keterlibatan tersebut memberikan arti penting bagi pembangunan kota berkelanjutan. Ruang publik yang dibangun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan akses bagi kaum difabel.

3. Implementasi Proyek Percontohan (*Pilot Projects*)

Pada 2016, Pemkot Surabaya, UCLG ASPAC, UN-Habitat dan Kementerian PUPR Ditjen Cipta karya menandatangani MoU tentang proyek percontohan Global Public Space Programe di tiga lokasi di Surabaya, yaitu Kampung Ketandan, Keputih dan Tanah Kali Kedinding. Pemilihan tiga tempat tersebut dilakukan melalui proses perundingan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan program dan anggaran (Rahmasari 2020).

a. Kampung Ketandan

Sebuah ruang publik berupa balai budaya disepakati untuk dibangun kembali sebagai tempat untuk berkegiatan masyarakat. Balai budaya ini diberi nama 'Cak Markeso,' nama ini diambil dari nama tokoh pemain Ludruk (pertunjukan teater lokal). Keberadaan sebuah balai budaya (Joglo) di Kampung Ketandan dapat menyediakan ruang bagi komunitas untuk bertemu dan berinteraksi, serta pameran seni dan kebudayaan lokal lainnya. Selain meningkatkan persatuan dan interaksi sosial, joglo ini juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian warisan budaya bagi masyarakat Surabaya.

Kampung Ketandan dipilih untuk dilakukan revitalisasi karena kampung ini merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya. Kampung kecil di Jalan Tunjungan ini merupakan saksi bisu sejarah panjang kota Surabaya yang masih bertahan melawan arus modernisme.

Meskipun terhimpit berbagai bangunan tinggi yang serba modern, Kampung Ketandan masih terus bertahan melawan gempuran pembangunan mega proyek di Surabaya (Hakim, 2018).

Figur 1.
Desain Ruang Publik di Kampung Ketandan Memakai Gim Minecraft



Sumber : Annual Report 2016 *Global Public Space Programme*

Figur 2.
Balai Budaya 'Cak Markeso' Kampung Ketandan (Sebelum dan Sesudah Direvitalisasi)



Sumber : Bidang Administrasi Kerjasama Internasional Pemerintah kota Surabaya

b. Keputih

Ruang publik yang dibangun di Keputih merupakan lokasi bekas insinerator (tempat pembakaran sampah) milik Pemkot Surabaya yang diubah menjadi ruang publik kreatif.

Keputih dipilih untuk diubah menjadi ruang publik karena lokasi ini memiliki luas lahan cukup luas meski lama tidak terurus.

Bangunan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan oleh siapapun. Pemkot Surabaya dan UCLG ASPAC juga mengajak masyarakat dan komunitas lokal serta komunitas difabel dalam lokakarya yang dilaksanakan selama 7 hari (uclg-aspac.org, 2016). Pada acara lokakarya tersebut, usulan dari masyarakat kemudian diterjemahkan oleh para pendesain dan perencana kota.

Selain taman, fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Surabaya di antaranya adalah aula utama, parkir sepeda, ruang kreatif, *water playground*, lapangan basket, *food court*, ruang komunitas terbuka, galeri pendidikan, ruang pertunjukan, taman baca, toilet ramah disabilitas dan taman mural (Anto 2017). Taman dengan *jogging track* yang sangat *instagramable* juga tersedia. Taman ini juga terdapat area pameran hasil karya masyarakat dan lengkap juga dengan amfiteater terbuka (surabayainside.com 2019). Menurut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pembangunan ruang publik di Keputih merupakan bagian dari rencana pemerataan pembangunan di Surabaya.

Figur 3.
Wali Kota Surabaya, Sekretaris Jenderal UCGL ASPAC, dan Perwakilan Kementerian PUPR melakukan *Groundbreaking* Pembangunan Ruang Publik Kreatif di Keputih Surabaya, Agustus 2017



Sumber : humas.surabaya.go.id

c. Tanah Kali Kedinding

Ruang publik di Kedinding adalah proyek ketiga. Bekerjasama dengan Mojang, UCLG ASPAC melibatkan penggunaan Minecraft, aplikasi gim komputer untuk membantu membangun desain ruang publik mereka sendiri di Tanah Kali Kedinding (uclg-aspac.org 2017). Pemkot Surabaya dan UCLG ASPAC melakukan pelatihan penggunaan aplikasi Minecraft untuk desain ruang publik.

Pelatihan Minecraft di Kedinding merupakan salah satu rangkaian acara dari *The Third Session of The Preparatory Committee Meeting* (Prepcom 3), atau proses persiapan dan konsultasi menuju Konferensi Habitat III tentang perumahan dan pembangunan kota berkelanjutan yang dilaksanakan di Surabaya. Lokakarya partisipatif ini dihadiri oleh komunitas dari berbagai latar belakang yang berbeda mulai dari remaja tokoh masyarakat, komunitas difabel, serta aktor lokal lainnya termasuk pejabat dan profesional lokal.

Peserta diberi kesempatan untuk mengembangkan desain mereka sendiri melalui kerja kelompok. Pelatihan ini didampingi pihak UN-Habitat dan dihadiri oleh masyarakat setempat, perwakilan Pemkot Surabaya, ahli teknis, dan beberapa komunitas kreatif. Melalui lokakarya desain partisipatif tersebut, para pemuda dan komunitas lokal memvisualisasikan ide desain perkotaan mereka di Minecraft dan kemudian menyajikannya ke perwakilan Pemkot Surabaya. Taman ini menyediakan zona bermain anak, area olahraga, hingga sentra wisata kuliner (Basoro 2019).

Senada dengan lokasi sebelumnya, pemilihan lokasi ini merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di Surabaya. Tanah Kali Kedinding yang terletak di Surabaya bagian Utara belum memiliki ruang publik sebelumnya. Lahan yang dipersiapkan adalah lahan Pasar Kali Kedinding yang sudah lama ditutup dan tidak dipergunakan lagi. Selain untuk mengurangi polusi udara, dengan dibangunnya ruang publik bertema taman, lokasi tersebut diharapkan dapat menghapus kesan kumuh dan panas yang melekat pada wilayah Surabaya bagian utara.

Figur 4.
Desain Ruang Publik Kreatif di Keputih



Sumber : UCLG ASPAC Annual Report 2016

Figur 5.
Peresmian Ruang Publik Kreatif di Keputih oleh Walikota Surabaya dan Delegasi UCLG ASPAC



Sumber : Jatim.antaranews.com

Ruang terbuka adalah aset berharga dalam menciptakan kota berkelanjutan. Di kota yang tidak mempunyai lahan luas dan warganya tidak punya ruang pribadi yang cukup, ruang terbuka untuk masyarakat umum adalah pilihan terbaik (Cohen 2015, 167). Banyak cara inovatif yang dijalankan untuk membuka ruang terbuka. Implementasi proyek percontohan Global Public Space Programme di Surabaya adalah contoh konkrit bahwa pemerintah lokal dapat bekerjasama dengan berbagai pihak di level lokal, nasional, dan global untuk mengubah fungsi lahan tidak terpakai menjadi sebuah ruang publik yang dapat dinikmati seluruh warganya.

Ketiga proyek percontohan di Surabaya telah memenuhi beberapa target untuk mewujudkan tujuan SDGs ke-11. Revitalisasi ruang publik di Kampung Ketandan telah memenuhi target dari SDGs ke-11.4, yaitu dengan lokakarya partisipatif dalam proses pembangunan ruang publik, secara langsung dapat menciptakan rasa memiliki, memperkuat ikatan sosial dan membentuk karakter masyarakat yang baik. Menciptakan ruang publik bertema 'Balai Budaya' merupakan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam dan budaya yang ada di kota Surabaya. Fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah diharapkan dapat menjaga nilai-nilai budaya di zaman moderen yang banyak mengubah kebiasaan masyarakat dari yang cenderung individual ke masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Implementasi lain dengan menghadirkan ruang publik Kreatif Keputih yang berupa taman telah memenuhi target SDGs ke 11.6. Peningkatan kota dan penduduk di Surabaya memunculkan beberapa masalah, seperti tingginya produksi sampah dan meningkatnya polusi udara dan air. Pemanfaatan lahan bekas insinerator (pembakaran sampah) yang sudah lama tidak terpakai menjadi sebuah ruang publik yang dikelola dengan rapi merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi target perbaikan kualitas udara di Surabaya. Meskipun masih dalam tahap pembangunan, ruang publik di Kedinding direncanakan juga akan bertema taman kota. Hal ini tentunya menambah daftar ruang publik bertema taman yang diharapkan dapat mengurangi polusi udara di Surabaya.

Pembangunan ruang publik di tiga lokasi (Ketandan, Keputih dan Kedinding) memiliki konsep yang berbeda seperti taman pada umumnya. Hal ini terlihat dari proses desain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang dapat dinikmati bagi semua golongan masyarakat Surabaya. Implementasi Global Public Space Programme di tiga lokasi tersebut telah memenuhi target SDGs ke-11.7, yaitu menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah diakses. Indikator aman, inklusif, dan mudah diakses tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta proses desain yang telah melewati beberapa tahap penyesuaian yang di upayakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota Surabaya, khususnya untuk perempuan, anak-anak, manula dan penyandang disabilitas.

Meski disponsori oleh UN Habitat dan UCLG ASPAC, peran pemkot Surabaya sebagai tempat proyek berlangsung sangatlah krusial. Secara legal formal, peran Pemkot dituntut untuk tidak hanya melakukan aktualisasi dan optimalisasi, tetapi juga membuat terobosan yang efektif dan terlihat nyata manfaatnya (Isnaeni 2013, 135). Proses negosiasi dan prioritas kepentingan dalam proyek yang melibatkan banyak pihak akan menemui banyak dinamika. Bervariasinya pemangku kepentingan yang berpartisipasi menunjukkan bahwa proyek GPSP mempertimbangkan seluruh elemen yang dibutuhkan dalam proses pembangunan berkelanjutan, seperti pemerintahan (*governance*) dan ekosistem sosial-politik.

Pemerintah lokal dan pusat yang diwakili masing-masing oleh Pemkot Surabaya dan Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya berperan besar dalam memetakan ulang isu pembangunan berkelanjutan di luar perspektif lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemkot Surabaya telah berhasil menyajikan kerangka lain dari pembangunan berkelanjutan dengan bukti berhasilnya pengadaan ruang publik umum. Bila sebelumnya proyek pembangunan

berkelanjutan hanya diisi dengan proyek penghapusan kemiskinan, penurunan pengangguran, penjaminan pendidikan, dan peningkatan kesehatan fisik, menghadirkan kota yang berkelanjutan juga harus dipahami dan dipromosikan kepada warga *mega-city* seperti Surabaya.

Proses kerjasama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa ada satu kepentingan bersama yang ingin dicapai, yakni kota berkelanjutan. UN Habitat dan UCLG ASPAC adalah organisasi internasional yang membantu dari segi sponsor dan promosi. Para ahli/profesional dari swasta dan kampus menjadi desainer dan pengeksekusi di lapangan. Masyarakat dan perwakilan komunitas lokal di Surabaya adalah target utama pengguna (*end user*) proyek yang sedang dikerjakan. Masing-masing pihak memiliki kapasitas dan kemampuannya sendiri, namun dapat berkoordinasi dengan baik. Penggunaan gim Minecraft adalah salah satu aktifitas yang dapat menjadi model di mana masyarakat dapat menunjukkan eksistensi dan opininya mengenai desain ruang terbuka yang mereka inginkan.

Hal lain yang perlu diapresiasi adalah bagaimana pemilihan ketiga lokasi proyek percontohan dilakukan oleh pihak pemkot Surabaya. Tahap terakhir dari proses diplomasi pembangunan berkelanjutan adalah memastikan bahwa segala sumber daya yang dipakai bersifat fleksibel dan cepat merespon (Moomaw et al. 2017, 7). Ketiga tempat proyek percontohan tersebut dapat dikatakan mewakili wilayah dan warga Surabaya dengan segala karakter dan keunikannya. Keputih adalah wilayah yang telah lama dikenal sebagai “tempat penampungan sampah” oleh warga Surabaya pada umumnya. Membangun taman/ruang terbuka di sana merupakan pilihan strategis karena selain memanfaatkan lahan kosong, stigma negatif masyarakat terkait tempat tersebut perlahan terkikis. Menghapus asosiasi suatu wilayah terhadap hal yang negatif dalam opini warga tidaklah mudah. Maka, pembangunan taman tersebut adalah langkah awalnya. Begitu juga dengan Tanah Kali Kedinding. Wilayah Surabaya bagian utara yang berada jauh dari pusat kota dan tempat hiburan merupakan tempat strategis bila Pemkot Surabaya ingin membangun taman/ruang terbuka. Dengan begitu masyarakat tidak akan merasa adanya ketimpangan pembangunan.

Kesimpulan

Surabaya sebagai salah satu kota tujuan urbanisasi menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu upaya merespon isu urbanisasi, pemkot Surabaya melakukan kerjasama dengan United Cities Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) melalui Global Public Space Programme (GPSP). GPSP yang berlangsung dari tahun 2016 telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di level lokal, nasional, maupun global. Penulis menyimpulkan bahwa proyek ini telah berhasil dilaksanakan dengan melihat bahwa tiga strategi telah dieksekusi sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut menggunakan tiga strategi, yakni pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan ruang publik, penggunaan sumber pengetahuan baru, dan pengimplementasian pembangunan proyek percontohan. Pemkot Surabaya memegang peran dan posisi penting dalam proyek ini. Berbagai pertimbangan proyek ini memasukkan elemen-elemen kota berkelanjutan, yakni lingkungan, ekosistem sosial-politik, dan pemerintahan. Partisipasi warga Surabaya pun perlu diapresiasi tinggi dan menjadi model yang baik mengingat para warga telah antusias mengikuti berbagai aktifitas proyek ini, mulai dari proses sosialisasi, pelatihan, lokakarya hingga penggunaan taman/ruang terbuka.

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan penelitian empirik lebih lanjut dengan studi kasus yang lebih detail dan penggunaan indikator efektifitas kerjasama pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu pemerintah lokal. Hal ini perlu dilakukan karena proyek kolaborasi seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang bisa saja tidak menambah efektifitas kolaborasi itu sendiri.

Referensi

Buku

- Attfield, Robin., 2015. *The Ethics of the Global Environment*. London: Edinburgh University Press.
- Chasek, Pamela S., dan Wagner, L.M., 2012. *The Roads from Rio: Lessons Learned from Twenty Years of Multilateral Environmental Negotiations*. New York: Routledge.
- Cohen, Steven A., 2015. *The Sustainable City*. New York: Columbia University Press.
- Diamond, Louise, dan McDonald J, 1996. *Multi-Track Diplomacy*. West Hastford: Kumarian Press.
- Sachs, Jeffrey D., 2015. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.

Jurnal

- Andersson, Cecilia, 2016. "Public Space : Key To Implementation of the New Urban Agenda", *The Journal of Public Space*, 1 (1): 5-10.
- Blowers, Andrew, et. al., 2012. "Is Sustainable Development Sustainable?", *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 9 (1): 1-8.
- Boström, Magnus, 2012. "A Missing Pillar? Challenges in Theorizing and Practicing Social Sustainability: Introduction to The Special Issue", *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 8 (1): 3-14.
- Gray, Rob, 2010. *Is Accounting for Sustainability Actually Accounting for Sustainability ... and How Would We Know? An Exploration of Narratives of Organisations and The Planet*", *Accounting, Organizations and Society*, 35 (1): 47-62.
- Isnaeni, Nurul, 2013. "Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Global & Strategis*, 7 (1): 123-138.
- Khan, Huma H., et al., 2020. "Challenges for Sustainable Smart City Development: A Conceptual Framework", *ERP Environment*, 28 (5).
- Klarin, Tomislav, 2018. "The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues", *Zagreb International Review of Economics & Business*, 21 (1): 67-94.
- Moomaw, William. R., et. al., 2017. "Sustainable Development Diplomacy: Diagnostics for the Negotiation and Implementation of Sustainable Development", *Global Policy*, 8 (1): 73-81.
- Mensah, Justice, dan Casadevall S. R (eds.), 2019. "Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review", *Cogent Social Sciences*, 5 (1): 1-21.

- Mensah, Justice, dan Enu-Kwesi, F., 2018. "Implication of Environmental Sanitation Management in the Catchment Area of Benya Lagoon, Ghana", *Journal of Integrative Environmental Sciences*. 6 (1): 23-43.
- Murphy, Kevin, 2012. "The Social Pillar of Sustainable Development: A Literature Review And Framework For Policy Analysis", *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 8 (1): 15-29.
- Ravazzoli, Elisa., dan Torricelli, G. P., 2017. "Urban Mobility and Public Space: A Challenge for The Sustainable Liveable City of The Future", *The Journal of Public Space*, 2 (2).
- Yazdani, Saeid, Dola K., 2013. "Sustainable City Priorities in Global North versus Global South", *Journal of Sustainable Development*, 6 (7): 38-47.

Wawancara

Rahmasari, 2020. Wawancara: Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya.

Artikel Daring

- Anto, 2017. "Pembangunan Ruang Publik Kreatif di Keputih" [daring]. dalam <http://mediakorannusantara.com/pembangunan-ruang-publik-kreatif-di-keputih-ditargetkan-selesai-akhir-tahun-ini/> [diakses 6 Maret 2020].
- Bappenas. "Kota dan Pemukiman Berkelanjutan" [daring]. dalam <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-11/> [diakses 22 Maret 2020].
- Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. "Tingkat Urbanisasi di Surabaya" [daring]. dalam <https://disnaker.surabaya.go.id/> [diakses 30 November 2020].
- Basoro, Hari, 2019. "Jelang Akhir Tahun Surabaya Punya 3 Taman Baru" [daring]. dalam <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Jelang-Akhir-Tahun-Surabaya-Punya-Tiga-Taman-Baru/> [diakses 13 Maret 2020].
- Shandy, 2015. "Urbanisasi Tantangan Kota Surabaya" [daring]. dalam <https://www.kompasiana.com/shandybee/56791a9fb49373ec0673fca8/urbanisasi-tantangan-kota-surabaya> [diakses 21 Maret 2020].
- UCLG ASPAC. "Programme and Project" [daring]. dalam <https://uclg-aspac.org/en/what-we-do/programmes-projects/public-space-with-un-habitat/> [diakses 10 Januari 2020].
- UCLG ASPAC. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah" [daring]. dalam <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf> [diakses 21 Februari 2020].
- UCLG ASPAC. "Annual Report 2016, Catalyzing Local Action: Lessons From Asia and the Pacific" [daring]. dalam https://uclg-aspac.org/wp-content/uploads/2017/03/AR_UCLG-2016.pdf [diakses 17 Februari 2020].
- UCLG. "Public Space Policy Framework: The Charter of Public Space" [daring]. dalam https://www.uclg.org/sites/default/files/public_space_policy_framework.pdf [diakses 18 Februari 2020].

- UN-Habitat. "Public Space" [daring]. dalam <https://unhabitat.org/topic/public-space> [diakses 18 November 2018].
- UN-Habitat. "Global Public Space Programme 2017" [daring]. dalam https://unhabitat.org/sites/default/files/Annual%20Report_Final%20low%20Res.pdf [diakses 4 Januari 2020].
- UN-Habitat, "Global Public Space Annual Report 2018: Objectives of the Global Public Space Programme" [daring]. dalam <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018/12/apo-nid219666-1334836.pdf> [diakses 27 Januari 2020].
- UN-Habitat. "Using Minecraft for Community Participation in Public Space Design," Habitat3" [daring]. dalam <http://habitat3.org/the-conference/programme/all/using-minecraft-for-community-participation-in-public-space-design/> [diakses 20 Januari 2020].
- UN-Habitat. "65th Regular Meeting of The Committee of Permanent Representatives to United Nations Human Settlements Programme : Briefing Note on Public space in Asia-Pacific" [daring]. dalam https://oldweb.unhabitat.org/wp-content/uploads/2017/09/ED-Statement-on-Agenda-item-9-on-NUA_1.pdf [diakses 30 Januari 2020].
- UN-Habitat. "Fact Sheet Global Public Space Programme" [daring]. dalam <https://nua.unhabitat.org/uploads/Fact%20Sheet%20%20Global%20Public%20Space%20Programme.pdf> [diakses 27 Januari 2020].